

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instabilitas atau ketidakstabilan politik di Timur Tengah telah terjadi selama bertahun-tahun karena adanya konflik antarnegara, konflik bersenjata, konflik ideologis dan ketidaksejahteraan masyarakat. Namun, program nuklir Iran telah memperburuk situasi tersebut dan menambah tingkat kekhawatiran dan ketegangan di kawasan. Program nuklir Iran merupakan kegiatan pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Program ini telah menjadi perhatian dan sumber kekhawatiran internasional selama bertahun-tahun karena beberapa pihak meragukan tujuan akhir program nuklir Iran yang dicurigai akan digunakan untuk memproduksi senjata nuklir.¹

Pada tahun 1957 saat masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran menandatangani kerjasama nuklir dengan Amerika Serikat dalam program *Atoms For Peace*. Tahun 1960, Iran membangun fasilitas nuklir untuk tujuan pembangkit listrik dan penelitian di Pusat Penelitian Nuklir Teheran. Namun, program ini telah menjadi perhatian internasional pada tahun 2002, ketika kelompok oposisi Iran *National Council of Resistance of Iran* (NCRI) mengungkapkan bahwa pemerintah Iran telah membangun fasilitas nuklir bawah tanah secara rahasia di Natanz dan Arak yang tidak diketahui oleh Organisasi Energi Atom Internasional (IAEA).² Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Iran mungkin mencoba memproduksi senjata nuklir, meskipun pemerintah Iran telah mengatakan bahwa tujuan program nuklir mereka adalah untuk keperluan energi saja.

¹ Rio Sundari, Tesis: *Wacana Program Nuklir Iran sebagai Upaya Deterrence terhadap Amerika Serikat*, (Yogyakarta: UGM, 2013), hlm.1.

² International Institute for Strategic Studies, *Iran's Strategic Weapons Programmes: A Net Assessment*, (London: Routledge, 2005), hlm.16.

Iran telah mengklaim bahwa tujuan utama program nuklirnya adalah pengembangan kemampuan untuk memproduksi energi nuklir dalam keperluan domestik, seperti pembangkit listrik. Namun, beberapa pihak termasuk negara-negara Barat dan organisasi internasional seperti PBB telah meragukan kebenaran dari klaim ini dan mengatakan bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk tujuan militer.

Untuk memperkuat kepercayaan internasional terhadap tujuan nyata program nuklir Iran, PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta Iran untuk menghentikan aktivitas nuklirnya sampai Iran dapat membuktikan bahwa tujuannya benar-benar hanya untuk keperluan domestik. Iran telah menolak permintaan ini dan terus melanjutkan program nuklirnya, yang telah menyebabkan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat dan masalah keamanan internasional yang lebih luas.

Negara-negara barat menganggap bahwa pengembangan program nuklir Iran telah menyebabkan ketegangan dan instabilitas politik di Timur Tengah. Negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat merasa cemas tentang program nuklir Iran karena diduga digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini dapat membahayakan keamanan regional dan global. Selain itu, program nuklir Iran juga menyebabkan ketegangan antara Iran dengan negara-negara lain di kawasan ini, seperti Arab Saudi yang merasa terancam oleh kemampuan nuklir Iran.³

Instabilitas politik yang disebabkan oleh program nuklir Iran juga terjadi karena adanya intervensi dari negara-negara luar khususnya negara-negara barat yang terlibat dalam permasalahan ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap Iran dalam upaya untuk menghentikan program nuklir Iran. Sanksi ini telah menyebabkan masalah ekonomi di Iran, yang kemudian dapat menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

³ detikNews. (2012, February 10). Saingi Iran, Arab Saudi Ancam Kembangkan Senjata Nuklir. Diakses pada 22 Desember, 2022, dari website detiknews: <https://news.detik.com/internasional/d-1839523/saingi-iran-arab-saudi-ancam-kembangkan-senjata-nuklir>

Secara keseluruhan, program nuklir Iran telah menambah kekhawatiran dan ketegangan di Timur Tengah, terutama karena tuduhan bahwa program ini digunakan untuk tujuan militer dan adanya intervensi negara-negara luar. Hal ini dapat membahayakan keamanan regional dan global, dan perlu diatasi dengan cara yang efektif dan damai. Maka dari itu, dibuatlah sebuah perjanjian internasional yang dinamakan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015.⁴

Perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Jerman) dan Uni Eropa. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mencegah Iran dari membuat senjata nuklir dengan membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang telah dikenakan oleh PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada Iran kemudian menjamin bahwa program tersebut digunakan hanya untuk tujuan damai.⁵

Selain itu, tujuan lain dari JCPOA adalah untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat, terutama dengan menghapus sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran. Hal ini akan memungkinkan Iran untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional secara lebih luas yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan politik di wilayah tersebut. JCPOA juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam program nuklir Iran dengan menyediakan mekanisme pemantauan yang ketat oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) atau Badan Energi Atom Internasional. *International Atomic Energy Agency* (IAEA) adalah sebuah lembaga internasional yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir dengan tujuan mempromosikan penggunaan nuklir secara aman, damai dan

⁴ Made Santyas Larasati, Yusran, Paper: *Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibatalkannya Perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (2016 – 2019)*, (Jakarta: Universitas Budi Luhur), hlm.72.

⁵ Robinson, K. (2023, June 21). What Is the Iran Nuclear Deal? | Council on Foreign Relations. Diakses pada 22 Desember, 2022, dari website Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/what-iran-nuclear-deal>

terkontrol.⁶ Lembaga ini didirikan pada tahun 1957 dan berkedudukan di Vienna, Austria. IAEA bertugas mengawasi penggunaan nuklir di seluruh dunia untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti pembuatan senjata nuklir. Selain itu, lembaga ini juga membantu negara-negara anggotanya dalam pengembangan teknologi nuklir yang aman dan terkontrol untuk keperluan energi, kedokteran dan penelitian lainnya. Ini akan memastikan bahwa Iran tidak melanggar perjanjian dan tidak mengembangkan teknologi nuklir secara diam-diam.

Perjanjian ini mengikat Iran untuk mengurangi kapasitas produksi plutonium dan uranium yang dapat digunakan untuk tujuan militer, serta membatasi penggunaan fasilitas nuklirnya dan mengizinkan inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Perjanjian JCPOA juga mengharuskan Iran untuk mengikuti standar yang ketat dalam produksi dan penyimpanan bahan bakar nuklir, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kebocoran bahan bakar nuklir. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran oleh negara-negara P5+1 akan dicabut. Perjanjian JCPOA telah menjadi sumber kontroversi di kalangan pemerintah dan masyarakat internasional, dengan beberapa pihak seperti Israel dan Arab Saudi yang menganggap perjanjian tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah Iran dari memperoleh kemampuan nuklir militer⁷, sementara pihak lain seperti para fisikawan nuklir, pejabat militer, ahli non-proliferasi, dan lebih dari 100 negara di dunia mendukung JCPOA dan menganggap bahwa perjanjian tersebut merupakan

⁶ James Martin Center for Nonproliferation Studies. (2023, March 13). International Atomic Energy Agency. Diakses pada 22 Desember, 2022, dari website Nuclear Threat Initiative: <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/international-atomic-energy-agency/>

⁷ Al Jazeera. (2015, April 14). Why Saudi Arabia and Israel oppose Iran nuclear deal. Diakses pada 22 Desember, 2022, dari website Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2015/4/14/why-saudi-arabia-and-israel-oppose-iran-nuclear-deal>

solusi terbaik yang tersedia saat ini untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir tanpa melalui aksi militer.⁸

Meneliti tentang peran perjanjian internasional Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah penting dan perlu dilakukan karena beberapa alasan:

1. Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang sangat penting bagi stabilitas global, dengan banyak negara dan kelompok yang memiliki minat dan kepentingan yang berbeda. Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, dan merupakan jalur transportasi penting bagi barang dan jasa antar benua. Selain itu, Timur Tengah juga merupakan rumah bagi beberapa negara dan kelompok yang memiliki perbedaan ideologi dan politik yang sangat kuat, seperti Arab Saudi-Israel, Iran-Arab Saudi dan Sunni-Syi'ah.⁹

Karena begitu banyak negara dan kelompok yang memiliki minat dan kepentingan yang berbeda di wilayah ini, stabilitas politik di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas global. Konflik dan kekacauan di wilayah ini dapat menimbulkan dampak yang besar bagi stabilitas global, seperti peningkatan harga minyak, terhambatnya perdagangan dan peningkatan ancaman keamanan global.

2. JCPOA merupakan perjanjian yang memiliki dampak penting bagi stabilitas politik di Timur Tengah, karena perjanjian ini mengatur program nuklir Iran dan membatasi aktivitas nuklir Iran serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut.¹⁰

⁸ The White House. (n.d.). The Historic Deal that Will Prevent Iran from Acquiring a Nuclear Weapon. Diakses pada 31 Januari, 2023, dari website The White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/iran-deal>

⁹ Valeri Modebadze, *The Battle for Regional Dominance Between The Kingdom of Saudi Arabia and The Islamic Republic of Iran*, Vol. 4, Journal of Liberty and International Affairs, 2018, hlm.67.

¹⁰ Nabil Fahmy, *Nuclear Non-Proliferation and Disarmament in the Middle East*, Vol. 5, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2022, hlm.1.

3. Studi tentang peran JCPOA dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perjanjian internasional dapat berperan dalam mengatasi konflik dan menjaga stabilitas politik di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Studi ini juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana perjanjian internasional dapat mempengaruhi dan memodifikasi perilaku negara, dan memahami bagaimana proses negosiasi dan implementasi perjanjian internasional dapat mempengaruhi stabilitas politik di suatu wilayah.
4. Studi tentang peran JCPOA dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah juga dapat memberikan masukan dan informasi bagi negara-negara yang terkait dan lembaga-lembaga internasional yang berperan dalam mengatasi konflik dan mempromosikan stabilitas di wilayah-wilayah yang rawan konflik.

Penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti perjanjian internasional, kebijakan negara, dan perilaku negara-negara terkait mempengaruhi stabilitas politik di Timur Tengah, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas global secara keseluruhan. Dalam hal ini, perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) menjadi fokus penelitian karena perjanjian ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah. Penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana perjanjian internasional bisa mempengaruhi stabilitas politik di suatu wilayah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas global secara keseluruhan.

Oleh karena itu, topik ini menjadi menarik untuk diteliti dan diajukan sebagai proposal penelitian mengenai peran perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah, dengan judul **“Peran Perjanjian Internasional Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Timur Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah?
3. Bagaimana stabilitas politik di Timur Tengah dapat mempengaruhi stabilitas global secara keseluruhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah.
3. Menganalisis bagaimana stabilitas politik di Timur Tengah dapat mempengaruhi stabilitas global secara keseluruhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

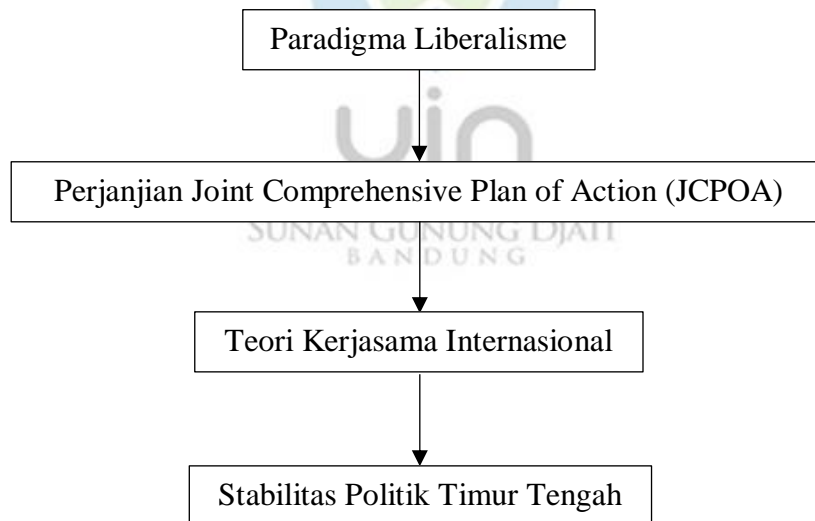
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan politik khususnya bidang studi politik internasional mengenai peran perjanjian internasional Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dalam menjaga stabilitas politik di Timur Tengah yang dianalisis melalui berbagai sudut pandang

berbeda yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami isu terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi *stakeholders* yang terkait dengan JCPOA dalam menentukan strategi dan kebijakan yang tepat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan JCPOA dalam meningkatkan dan menjaga stabilitas politik di Timur Tengah. Dan juga peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta kajian bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan isu keamanan global khususnya terkait stabilitas politik di Timur Tengah.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Paradigma liberalisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kerjasama, institusi internasional, dan norma yang diakui bersama dalam mencapai perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Teori Kerjasama Internasional, sebagai turunan dari paradigma liberalisme, menekankan pada pentingnya kerjasama antara negara-negara dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), terdapat hubungan antara paradigma liberalisme dan Teori Kerjasama Internasional. Paradigma liberalisme memberikan landasan pemikiran bahwa kerjasama antara negara-negara adalah cara yang efektif untuk mengatasi konflik dan memelihara stabilitas di kawasan terutama stabilitas politik. Teori Kerjasama Internasional kemudian menguraikan prinsip-prinsip dan mekanisme kerjasama yang dapat diterapkan dalam konteks perjanjian seperti JCPOA.

Perjanjian JCPOA melibatkan kerjasama antara negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Jerman) dengan Iran, yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme dan teori kerjasama internasional. Tujuan utama perjanjian ini adalah mencapai kompromi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dan menjaga stabilitas politik di Timur Tengah melalui pengendalian program nuklir Iran.

Namun, dalam konteks politik internasional, setiap negara yang terlibat dalam perjanjian JCPOA memiliki kepentingan nasional yang beragam. Politik internasional merupakan studi tentang interaksi politik antara negara-negara dalam sistem internasional. Hal ini melibatkan analisis dan pemahaman terhadap kebijakan negara, diplomasi, kerjasama, konflik, serta dinamika politik yang mempengaruhi hubungan antarnegara di tingkat global. Setiap negara memiliki tujuan dan prioritasnya sendiri, dan hal ini dapat menciptakan ketegangan dan perbedaan pendekatan dalam memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. Negara-negara terlibat akan mencoba untuk memastikan bahwa kepentingan nasional mereka dipertahankan dan diakomodasi dalam kerangka perjanjian tersebut.

Dalam hal politik internasional, negara-negara terlibat dalam perjanjian JCPOA akan mempertimbangkan implikasi kebijakan domestik dan hubungan luar negeri mereka, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat mempengaruhi keamanan nasional dan reputasi mereka di mata komunitas internasional. Hal ini dapat menciptakan dinamika politik yang kompleks dan mempengaruhi pelaksanaan dan keberlanjutan perjanjian.

Secara keseluruhan, hubungan antara paradigma liberalisme, Teori Kerjasama Internasional, dan perjanjian JCPOA mencerminkan upaya untuk mencapai kerjasama dan stabilitas politik melalui norma, institusi, dan kompromi. Namun, aspek politik internasional dan kepentingan nasional negara-negara yang terlibat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi dan kelangsungan perjanjian tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Namun setelah peneliti telusuri, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus meneliti tentang analisis keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA pada tahun 2018, dampak yang ditimbulkan, dan alasan yang melatarbelakangi keputusan Amerika Serikat tersebut. Penelitian yang memiliki lingkup penelitian lebih luas yang mencakup implikasi JCPOA terhadap kestabilan politik suatu kawasan, dalam hal ini kawasan Timur Tengah belum pernah dilakukan. Beberapa contoh dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardylara Mayang Purnama (2019) yang berjudul **“Faktor Pendorong Penarikan Diri Amerika Serikat dari Perjanjian Nuklir (Joint Comprehensive Plan of Action) Dengan Iran pada Tahun 2018”** meneliti tentang faktor yang melatarbelakangi keputusan Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari perjanjian JCPOA pada tahun 2018. Penelitiannya menjelaskan bahwa sebelum perjanjian

JCPOA disahkan, terdapat beberapa kelompok atau individu, termasuk warga Amerika Serikat, yang menentang adanya perjanjian tersebut karena takut akan Iran yang mungkin akan memperbaiki ekonominya dan mengembangkan program nuklir secara rahasia. Sebagian Yahudi Amerika Serikat juga tidak setuju dengan perjanjian tersebut, dengan Yahudi Ortodoks Amerika Serikat yang menganggapnya lemah. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat, khususnya Partai Republik di Kongres, menolak perjanjian tersebut. Namun, Barack Obama masih mempertahankan kebijakannya untuk memastikan bahwa JCPOA dapat dilaksanakan. Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan memberikan veto jika ada keputusan Kongres yang menunda pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut juga tidak pernah diajukan ke Senat, dan tidak ada satu pun Senator Republik yang menyetujui perjanjian tersebut.

Ardylara Mayang Purnama menuliskan bahwa dari faktor internal dan eksternal yang mendorong Amerika Serikat untuk keluar dari Perjanjian JCPOA, faktor internal merupakan faktor yang paling dominan. Faktor ini lebih spesifiknya adalah karena adanya perubahan rezim di Amerika Serikat dengan kepemimpinan Donald Trump. Meskipun perjanjian ini merupakan perjanjian yang kebijakannya hanya ditentukan oleh eksekutif, namun Trump terlihat memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Saputra (2019) yang berjudul **“Keputusan Uni Eropa Mempertahankan Perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Dengan Iran Tahun 2018”** meneliti tentang alasan Uni Eropa mempertahankan Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) dengan Iran meskipun Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari perjanjian tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2018, Amerika Serikat yang ketika itu masih dipimpin oleh Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali semua sanksi terhadap Iran karena program nuklirnya. Uni Eropa sebagai

salah satu negara yang terlibat dalam perjanjian JCPOA sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh AS. Uni Eropa merespon dengan memperbaharui "*Blocking Statute*"¹¹ meskipun AS mengancam akan melarang negara-negara untuk melakukan bisnis dengan mereka jika negara-negara tersebut masih berupaya untuk membantu dan berbisnis dengan Iran.

Berdasar analisis yang dilakukan, Indra Saputra berkesimpulan bahwa alasan Uni Eropa tetap mempertahankan perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan Iran pada tahun 2018 adalah untuk menjaga keamanan wilayah Uni Eropa dari berbagai ancaman. Kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Penting bagi Uni Eropa untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah karena konflik militer di sana akan memiliki dampak besar pada Uni Eropa. Dalam *European Security Strategy* dan *EU Weapon Mass Destruction*, Uni Eropa menganggap senjata nuklir sebagai ancaman utama dan percaya bahwa perjanjian JCPOA akan membatasi perilaku Iran dalam hal program nuklir sehingga ancaman dari program nuklir Iran akan berkurang.

¹¹ Blocking Statute adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Uni Eropa untuk melindungi perusahaan dan individu Eropa dari efek dari sanksi yang diterapkan oleh negara lain. Statut ini membatasi kemampuan perusahaan dan individu Eropa untuk mematuhi sanksi yang diterapkan oleh negara lain dan memerlukan mereka untuk melanjutkan bisnis dengan negara yang dikenai sanksi. Statut ini diterbitkan pada tahun 1996 dan sejak saat itu telah diperbaharui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi politik dan ekonomi global.